

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data sebagaimana fokus kajian dalam penelitian yang berjudul “Perencanaan Strategik Mutu Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Bandung” diperoleh kesimpulan secara keseluruhan perencanaan strategik di kedua sekolah dilaksanakan masih secara terpisah atau parsial, pemahaman para pimpinan sekolah terhadap perencanaan strategik masih kurang, hal ini dilihat dari beberapa tahapan perencanaan strategik tidak dilaksanakan. Sedangkan secara rinci, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis perencanaan mutu sekolah dilaksanakan dengan menetapkan visi, misi dan tujuan, analisis pasar, analisis SWOT dan penyusunan rencana strategik sekolah. Visi, misi dan tujuan SMPN 5 Bandung lebih mengarah pada visi internasionalisasi sekolah. Sedangkan visi, misi dan tujuan SMPN 29 lebih mengarah pada peningkatan kualitas lulusan dari segi intelektual, sikap dan Spiritual.

Riset calon siswa tidak dilaksanakan di kedua sekolah dengan anggapan masyarakat masih memilih sekolah negeri sebagai alternatif utama untuk melanjutkan pendidikan, namun masing-masing sekolah memiliki kriteria calon siswa tersendiri. Kriteria calon siswa SMPN 5 Bandung adalah memiliki harapan yang tinggi, nilai UN sekolah yang baik dengan standar kluster satu. Sedangkan karakter calon siswa SMPN 29 Bandung adalah harapan tidak terlalu tinggi, yang penting masih bisa sekolah, nilai UN dengan standar kluster dua dan cenderung diterima tanpa ada batasan nilai UN.

Analisa SWOT di kedua sekolah dilaksanakan dengan proses yang sama yaitu dilaksanakan oleh tim khusus yang kemudian bekerja sampai dengan sosialisasi hasil analisis. Namun yang membedakan adalah faktor kunci kesuksesan sekolah. Faktor kunci SMPN 5 Bandung adalah SDM yang sudah 100% Sarjana dan tidak sedikit yang S2, sarana dan prasarana memadai, daya

dukung orang tua tinggi. Sedangkan di SMPN 29 kunci suksesnya yaitu SDM 98% sarjana dan dukungan komite sekolah yang kooperatif.

Rencana Strategik Sekolah disusun di kedua sekolah dengan kriteria masing-masing sekolah. pengembangan mutu di SMPN 5 Bandung lebih menekankan pada aspek SDM dan sarana belajar, sedangkan di SMPN 29 lebih menekankan pada aspek sarana dan prasarana. Spesifikasi program di SMPN 5 Bandung berdasarkan pada tujuh program inti dan pengembangan delapan standar nasional pendidikan. Sedangkan di SMPN 29 Bandung pengembangan program lebih menekankan pada lima program strategis yaitu program pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, peningkatan profesionalisme guru, pengembangan ekstrakurikuler, pelaksanaan budaya islami dan peningkatan kualitas lingkungan sekolah.

2. Perencanaan operasional dan bisnis sekolah meliputi rencana operasional, kebijakan mutu dan biaya mutu dilaksanakan sesuai dengan kriteria masing-masing sekolah. Dasar dari penyusunan rencana operasional sekolah di SMPN 5 Bandung adalah Hasil EDS, masukan dari orang tua dan guru, standar nasional pendidikan, prestasi akademik dan non akademik sekolah, dan analisis kebutuhan. Sedangkan di SMPN 29 Bandung, penyusunan Rencana operasional didasarkan atas hasil EDS, delapan standar nasional pendidikan, kondisi keuangan sekolah, dan petunjuk penggunaan dan BOS. Proses penyusunan rencana operasional di kedua sekolah tidak jauh berbeda yaitu sekolah membentuk tim khusus yang terdiri dari gabungan berbagai bidang garapan kemudian masing-masing tim mengajukan dan dibahas bersama untuk kemudian disepakati bersama. Hasil dari kesepakatan ini diserahkan ke komite sekolah untuk kemudian disetujui oleh komite dan terakhir diserahkan ke dinas pendidikan kota untuk disetujui oleh dinas pendidikan kota. Pengaruh dari perencanaan operasional sekolah di SMPN 5 Bandung adalah sampai saat ini sekolah masih bisa mempertahankan reputasinya di masyarakat dengan tetap menjadi alternatif pertama di Kota Bandung, sedangkan SMPN 29 reputasi sekolah meningkat dengan menjadi

pilihan kedua tanpa harus menjadi pilihan terakhir calon siswa, sehingga hal ini meningkatkan nilai rata-rata indeks siswa yang masuk ke sekolah.

Kebijakan Mutu Kebijakan mutu berupa statemen mutu belum ditemukan di kedua sekolah. Meskipun SMPN 5 Bandung pernah mendapatkan sertifikat ISO namun kebijakan mutu tersebut tidak ditemukan di sekolah, sekolah masih beranggapan normatif terhadap kebijakan mutu dan berpegang pada komitmen dan integritas dari warga sekolah. SMPN 29 pun sama, kebijakan mutu berupa statemen tidak ditemukan di sekolah, sekolah hanya mengembalikan persepsi warga sekolah pada visi dan misi yang sudah ditentukan bersama.

Biaya Mutu. Biaya Mutu di masing-masing sekolah berbeda sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah masing-masing. Namun dari kedua sekolah ini biaya yang paling besar masih dalam biaya sarana dan prasarana sekolah. Namun, di SMPN 5 Bandung berdasarkan analisis RKAS biaya pengembangan SDM untuk peningkatan mutu SDM baik guru maupun TU lebih besar jika dibandingkan dengan SMPN 29, hal ini dikarenakan program dan kegiatan tersebut didanai bukan dari dana BOS melainkan dari dana komite sekolah yang bersumber dari orang tua dan dana Block Grant dari pemerintah. Sedangkan SMPN 29 hanya mengandalkan dana BOS dari pusat, provinsi dan kota saja. Terkait dengan biaya kegagalan yang meliputi adanya keluhan dan masukan dari siswa dan orang tua, SMPN 5 Bandung lebih tinggi intensitasnya dari SMPN 29 Bandung, hal ini dikarenakan tingkat perhatian orang tua di SMPN 5 Bandung lebih tinggi dibanding dengan perhatian orang tua di SMPN 29, hal ini dinilai positif oleh pihak SMPN 5 Bandung karena dengan adanya kritik dan masukan dari orang tua, sekolah bisa segera melaksanakan perbaikan dengan segera.

3. Program monitoring dan evaluasi di kedua sekolah dilaksanakan sesuai dengan konsep, namun pelaksanaannya sedikit berbeda diantara kedua sekolah. Evaluasi harian. Evaluasi harian yang dilaksanakan di kedua sekolah tidak mengalami banyak perbedaan. Evaluasi harian lebih ditekankan pada peran guru untuk memonitor perkembangan siswa dalam belajar, tes harian,

ujian tengah semester menjadi cara yang diupayakan oleh kedua ssekolah. Sedikit Perbedaan adalah peran guru BK di SMPN 5 Bandung sudah ada jadwal ke kelas, sehingga monitoring perkembangan siswa bisa lebih cepat, sedangkan di SMPN 29, guru BK belum bisa masuk ke kelas dikarenakan tidak tersedianya alokasi waktu untuk BK, sehingga monitoring perkembangan anak lebih ditekankan pada guru dan wali kelas saja.

Evaluasi jangka pendek di SMPN 5 Bandung sudah menggunakan data grafik perkembangan siswa. Data tersebut disusun dan dipampang di ruang kurikulum, sehingga ketika ada perubahan yang drastis atau permasalahan dari hasil layanan seperti nilai UN menurun, nila capaian KKM menurun bisa segera diketahui dan diambil tindakan segera. Sedangkan di SMPN 29 data tersebut memang ada, namun tidak dipampang di ruang wakasek, hanya sebatas laporan dalam profil sekolah saja, sehingga tindakannya pun berbeda dengan SMPN 5 Bandung.

Evaluasi Jangka panjang dilaksanakan di SMPN 5 Banudng setiap akhir tahun pelajaran, review program dan kegiatan disesuaikan dengan kondisi serta daya dukung sekolah yang dimiliki. Sehingga untuk tahun ajaran 2013/2014 SMPN 5 Bandung mengalami perubahan visi, misi dan tujuan dan sampai dengan penulisan laporan penelitian ini, SMPN 5 Bandung masih dalam tahap penyusunan visi dan misi yang baru. Perubahan visi dan misi tersebut tentu akan membawa dampak pada perubahan rencana strategik sekolah. Hal ini dilaksanakan berdasarkan analisa pihak sekolah saja. Sedangkan di SMPN 29 Bandung, sampai saat ini belum ada perubahan visi dan misi, namun rencana straegis sudah mulai disusun kembali dikarenakan Renstra yang sekarang sudah habis masa berlakunya yaitu RKS 2008-2012. Sejumlah evaluasi sudah mulai dikembangkan oleh SMPN 29 Bandung, namun sampai laporan ini disusun, SMPN 29 belum memiliki RKS baru untuk tahun 2013-2017.

Upaya evaluasi jangka panjang di SMPN 5 Bandung pernah ditempuh melalui penyebaran angket ke siswa sebagai pelanggan, namun berdasarkan hasil wawancara untuk tahun ajaran 2013/2014 angket tersebut belum pernah

dilaksanakan lagi. Sedangkan di SMPN 29 metode kuesioner belum pernah dilaksanakan oleh sekolah, evaluasi hanya dilaksanakan setelah kegiatan selesai diselenggarakan saja.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang diperoleh, maka peneliti mengajukan beberapa saran terkait hasil penelitian yang telah dilaksanakan, saran tersebut diharapkan dapat menjadi masukan, khususnya bagi Sekolah yang dijadikan tempat penelitian (SMPN 5 Bandung dan SMPN 29 Bandung), peneliti selanjutnya, serta pihak lain yang berkepentingan untuk dapat ditindaklanjuti.

Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi Sekolah
  - a. Pelaksanaan perencanaan strategik mutu sekolah dapat berjalan dengan kerja sama semua stake holder sekolah baik kepala sekolah, wakasek, guru, tenaga administrasi, orang tua, komite dan yang lainnya. Sehingga daya dukung dari semua stake holder harus terus diupayakan agar kepedulian semua elemen terhadap peningkatan mutu sekolah dapat mendorong juga kemajuan bagi sekolah yang bersangkutan.
  - b. Partisipasi orang tua yang sudah terlaksana di SMPN 5 Bandung, mesti dipertahankan dan lebih ditingkatkan bukan hanya pada partisipasi keuangan saja, namun juga partisipasi aktif pemikiran dan juga sumbangsih pemanataan sekolah agar tujuan pendidikan baik secara instittusional maupun secara nasional mampu terwujud dengan baik.
  - c. Perencanaan dengan basis partisipasi semua elemen organisasi harus lebih ditingkatkan dan didalam bentuk dan metode yang mampu diterapkan di sekolah. Sehingga seluruh proses manajemen mutu sekolah bukan hanya dimiliki oleh pimpinan saja, namun juga menjadi upaya semua pihak yang peduli dan mau mewujudkan kemajuan untuk sekolah.
  - d. Peningkatan pemahaman terhadap manajemen mutu pada umumnya dan perencanaan strategik khususnya harus terus ditingkatkan melalui keikutsertaan dalam pelatihan, seminar atau workhsop baik diselenggarakan oleh sekolah ataupun di luar sekolah.

## 2. Bagi Dinas Pendidikan

- a. Sebagaimana hasil penelitian dalam penelitian ini, bahwa upaya perencanaan strategis mutu sekolah yang dilaksanakan di satuan pendidikan masih menghadapi kendala dalam teknis pelaksanaan, terutama kendala dalam pendanaan. Hal ini dikarenakan anggapan masyarakat terhadap sekolah gratis, sehingga masyarakat kurang peduli dan minim partisipasi.
- b. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan bisa menyusun sebuah peraturan daerah terkait dengan partisipasi masyarakat khususnya dalam hal pendanaan pendidikan, hal apa saja yang bisa dibagikan untuk peningkatan partisipasi masyarakat, bagaimana pengelolaan keuangan yang bersumber dari masyarakat serta bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Sehingga sekolah tidak merasa khawatir untuk bisa mensosialisasikan program dan sharing pendanaan dengan masyarakat dan masyarakat pun tidak khawatir disangka gratifikasi ketika memberikan partisipasi dana ke sekolah.
- c. Pembinaan dari dinas pendidikan untuk keterlaksanaan perencanaan strategis mutu sekolah sangat diperlukan. Hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas SDM sekolah. Pembinaan bukan hanya sebatas pada seminar ataupun workshop, namun supervisi dari pengawas pendidikan harus lebih ditekankan pada pendampingan dan pembimbingan mulai dari analisis perencanaan strategis, sampai dengan monitoring dan evaluasi mutu sekolah.